Pembangunan Di Kabupaten Pegunungan Bintang

(Studi Kasus : Desa Denom Atukbin, Distrik Pepera)

Normalia Ode Yanthy ¹ dan Y.L.M. Sitorus ²

¹Staf Pengajar pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota USTJ

²Staf Pengajar pada Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota USTJ

e-mail: nala_ustj2006@yahoo.co.id

Abstrak

Berbagai program percepatan pembangunan yang direncanakan untuk wilayah Papua lebih banyak mengandalkan modal pembangunan yang berasal dari luar Papua dan kurang memperhatikan modal pembangunan dari dalam, seperti: modal manusia, sosial dan budaya orang asli Papua sendiri. Arah pembangunan menuju modernisasi di Papua tanpa mengandalkan modal pembangunan lokal yang ada akan membutuhkan dana yang sangat besar mengingat masih tertinggalnya peradaban di wilayah ini. Salah satu daerah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Desa Denom Atukbin yang direncanakan akan berkembang menjadi kota mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Terbatasnya modal pembangunan lokal berupa sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas manusia masih rendah) dan fasilitas pendukung (sarana prasarana masih minim) menunjukkan bahwa implementasi rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akan memerlukan dana yang jauh lebih besar (modal pembangunan dari luar). Dalam prosesnya, penduduk asli Desa Denom Atukbin diperkirakan tidak akan banyak terlibat atau bukan pelaku utama pembangunan tersebut.

Abstract

Various development acceleration programs planned for the Papua region rely more on development capital from outside Papua and pay little attention to development capital from within, such as: human capital, social and cultural Papuans themselves. Development towards modernization in Papua without relying on existing local development capital will require enormous funds because civilizations in this region are still lagging behind. The study area in this study is Denom Atukbin Village which is planned to develop into an independent city. This study uses a qualitative research approach with descriptive analysis methods. The limitation of development capital of local human resources (the quantity and quality of human beings is still low) and supporting facilities (infrastructure is still minimal) shows that the implementation of the development plan prepared by the Pegunungan Bintang Regency government will require greater funds (because it uses development capital from outside). In the process, the original inhabitants of Denom Atukbin Village are not expected to be involved much or not the main actors of the development.

Kata kunci: peradaban, orang asli Papua, modal pembangunan

I. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan yang dilakukan di Papua umumnya bersifat normatif dan mengikuti ketentuan yang diturunkan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, seperti misalkan rencana pembangunan harus disusun dengan jangka waktu-waktu tertentu, yaitu jangka pendek (setiap tahun), menengah (5 tahun) dan panjang (20 tahun). Dalam rangka efisiensi,

pemerintah biasanya menentukan daerah-daerah tertentu menjadi pusat-pusat layanan bagi wilayah di sekitarnya, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah penduduk yang ada di sana mampu menjangkau fasilitas-fasilitas layanan publik tersebut mengingat keterbatasan misalkan sarana prasarana transportasi dan kemampuan ekonomi untuk membayar biaya transportasi. Tidak sama

dengan karakteristik permukiman penduduk di Pulau Jawa, banyak permukiman di Pulau Papua tersebar pada wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah. Akibatnya, layanan fasilitas pemerintah yang dibangun di suatu lokasi menjadi kurang efektif. Keberadaan negara, dalam hal ini pemerintah, menjadi dipertanyakan di daerah-daerah yang masih terisolir karena masyarakatnya terabaikan dan tertinggal.

Pemerintah daerah di Papua dapat dikatakan belum mampu menyusun berbagai program pembangunan yang mengandalkan modal sendiri (*endogenous development*). Pemerintah setempat cenderung mengabaikan modal sosial dan budaya orang asli Papua (OAP) dan fokus pada modal sumber daya alam berikut dana otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di Papua. Sementara itu ada kecenderungan bahwa modal sosial dan budaya OAP menjadi penghambat pembangunan menuju modernisasi ini. Pemerintah pusat berusaha mengatasi keterbatasan berbagai infrastruktur dasar di Papua dengan mempercepat implementasi program-program pembangunan fisik, seperti misalkan pembangunan jalan trans Papua, dan untuk menjalankannya pemerintah banyak mengandalkan sumber daya yang berasal dari luar Papua, seperti misalkan sumber daya manusia (tenaga-tenaga kerja konstruksi), material, alat, dan pengetahuan serta teknologi modern. Mayoritas OAP tidak banyak terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini bisa menjadi sumber permasalahan baru. Pemerintah pusat tidak belajar dari pengalaman pembangunan pada masa lalu di Papua, yang mana OAP merasa tidak puas, bersikap pasif, apatis, regresif, agresif dan destruktif terhadap pihak negara/pemerintah dan pendatang, akibat perubahan sangat cepat yang harus mereka hadapi (Koentjaraningrat dkk, 1994). Negara tidak dapat 'memaksa' agar OAP segera berada pada tingkat peradaban yang dianggap lebih modern oleh pihak pemerintah/pendatang.

Pengabaian pemerintah terhadap modal pembangunan yang dimiliki suatu daerah dapat dilihat pada produk perencanaan pembangunan Desa Denom Atukbin di Kabupaten Pegunungan Bintang. Desa ini direncanakan akan dibangun

sebagai kota mandiri akibat karakteristiknya yang masih terisolir dan terbelakang.

II. KAJIAN PUSTAKA

Sumber-sumber daya yang dijadikan modal dalam pembangunan terdiri dari: modal sosial, modal budaya, modal manusia, modal finansial, modal pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya alam. Akan tetapi modal sosial dan budaya yang dimiliki oleh kelompok penduduk asli di suatu daerah sering diabaikan dalam pembangunan yang umumnya berorientasi pada modernisasi karena dianggap sebagai faktor penghambat. Dalam kehidupan penduduk asli, budaya masih berperan besar. Budaya dapat menjadi salah satu modal dalam pembangunan masyarakat (Throsby, 2001) sedangkan di lain pihak budaya dan karakteristik perilaku merupakan salah satu penyebab tetap terpuruknya kelompok penduduk asli di suatu daerah (Levi dan Lewi, 2010). Kelompok masyarakat tersebut jauh lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi ini ditemui bukan hanya pada negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Kelompok penduduk asli seperti Suku Indian di Amerika Serikat dan Suku Aborigin di Australia relatif lebih rendah tingkat kesejahteraannya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas lainnya di sana (Hall dan Patrinos, 2010).

Pengabaian modal sosial dan budaya setempat dalam pelaksanaan pembangunan sering menimbulkan konflik antara penduduk asli dengan pemerintah (negara). Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada orang asli Papua (OAP) seperti yang diceritakan berikut ini.

Berdasarkan data dari Kementerian PPN/BAPPENAS, mayoritas desa di Papua merupakan desa tertinggal dan jumlah desa tertinggal di Papua pada tahun 2011 dan 2014 relatif tidak banyak berubah. Pada tahun 2011, jumlah desa tertinggal di Papua sekitar 89,5% dan pada tahun 2014 adalah sekitar 91,06%. Sebagian besar desa-desa di Papua, terutama yang berada di daerah pedalaman, dihuni seluruhnya oleh OAP. Ini menunjukkan bahwa OAP di desa-desa atau kampung-kampung, belum banyak berkembang walau telah sekian lama menjalankan program pembangunan dari pemerintah. Mengapa hal ini terjadi dapat

dipahami jika melihat sejarah peradaban orang asli di Papua.

Secara peradaban, masyarakat asli Papua jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat lain di Indonesia. Interaksi dengan dunia luar baru terjadi sekitar tahun 1933 pada masyarakat pedalaman Papua (Diamond, 2015). Ada lompatan budaya cukup jauh yang harus dijalani

OAP, dari peradaban masa prasejarah tiba-tiba dihadapkan dengan peradaban modern. Papua mengalami proses perkembangan budaya dan peradaban yang begitu cepat hanya dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan banyak bangsa dan suku bangsa lain di dunia (Modouw, 2013, hal.37).

Gambar 1. Peta Sebaran Kondisi Kawasan Perdesaan Tahun 2011 (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015)

Kegiatan pembangunan atau modernisasi di Papua oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 1969. Sikap pemerintah Indonesia sama dengan pemerintah Belanda yang sebelumnya menduduki Papua, yaitu melihat penduduk asli Papua sebagai bangsa primitif sehingga perlu dimodernisasi. Ada perubahan peradaban yang dipaksakan pada OAP (Koentjaraningrat, dkk, 1994; Djojosoekarto, dkk, 2012; Suryawan, ed., 2011).

Ketidakmampuan mengikuti perkembangan peradaban yang demikian cepat ini melalui berbagai program pembangunan menimbulkan tanggapan negatif dari OAP, seperti perasaan kurang puas, sikap pasif,

apatis, dan regresif, dan keyakinan bahwa suatu saat akan tiba masa yang lebih baik, serta juga muncul sikap agresif dan destruktif (Koentjaraningrat dkk, 1994). Awalnya perasaan tidak puas mereka ditujukan pada Belanda yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan-perubahan yang cepat dan membingungkan mereka (Kouwenhon, 1956, dalam Koentjaraningrat dkk, 1994), kemudian ditujukan pada pemerintah Indonesia dan komunitas non Papua, pada saat Papua menjadi bagian dari Indonesia (Koentjaraningrat, dkk, 1994; Djojosoekarto, dkk, 2012).

Gambar 2. Peta Sebaran Kondisi Kawasan Perdesaan Tahun 2014 (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sebagian besar data yang dikaji adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah (mayoritas bersumber dari BPS Kabupaten Pegunungan Bintang) tetapi ada pula data primer yang diperoleh pada saat survei tahun 2016.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 Distrik dan 277 Kampung dengan ibukota kabupaten berada di Oksibil. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya dan terbentuk secara resmi pada tahun 2003. Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki luas 115.683 km² dengan dicirikan dominasi daerah pegunungan (66,09%) dan perbukitan (27,26%). Diperkirakan bahwa lebih dari 60% wilayah kabupaten ini terletak di dataran dengan ketinggian 200-4000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah bertopografi bukit dan pegunungan ini ada di barat dan tengah dengan puncak tertinggi

Puncak Mandala (4.700 meter di atas permukaan laut). Di puncak Pegunungan Mandala terdapat salju abadi yang menyelimuti gunung tertinggi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Salju berbentuk bintang itulah yang menjadi asal mula nama kabupaten pecahan Kabupaten Jayawijaya ini. Sementara sisanya di utara dan selatan merupakan dataran rendah. Kondisi kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat bervariasi, berkisar dari 0 sampai dengan 70% dan didominasi oleh kemiringan lereng yang lebih besar dari 30% dengan luas 7.611 km² atau sekitar 48% dari total luas wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah yang tidak pernah tergenang yaitu seluas 1.525.282 ha (97,26%) dan sebagian kecil merupakan daerah tergenang secara periodik yaitu seluas 42.920 ha (2,74%). Sungai-sungai di wilayah ini pada umumnya dangkal namun aliran sungainya cukup deras dan keruh. Sebagian besar sungai bermuara di wilayah bagian utara Papua dan hanya sebagian kecil yang bermuara di pantai bagian selatan Papua. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah Sungai

Oksibil, Sungai Digul di Distrik Oksibil, Sungai Oknagul, Oklip, Okhemek, Okngam, Oktupkun di Distrik Kiwirok, Sungai Okbem, Okyako, Oksip, Okangi dan Sungai Holander di Distrik Batom. Sungai-sungai tersebut merupakan salah satu sumber kehidupan serta sebagai sarana perhubungan, mata pencaharian masyarakat, potensi pariwisata dan potensi energi listrik.

Tutupan lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rapat dengan pepohonan. Lahan berupa hutan mendominasi luas wilayah ini, yaitu sekitar 88%. Dengan demikian penggunaan lahan terbesar adalah hutan, kemudian disusul oleh pertanian, khususnya pertanian lahan kering campuran, yaitu sekitar 5,8%. Hal ini adalah dampak dari morfologi yang ada di wilayah ini yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan yang cukup terjal. Lahan-lahan terbangun relatif sangat sedikit, pada umumnya memanfaatkan lahan-lahan yang landai yang luasnya cukup terbatas. Untuk itu luas lahan terbangun hanya sedikit, yaitu kurang 1% dari total seluruh luas kabupaten, dan lebih kecil dari tanah-tanah yang sudah terbuka dan semak/belukar (1,1%).

Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari dataran dan perbukitan, dan sebagian besar merupakan kawasan yang mempunyai kemiringan sangat curam/terjal. Penduduknya bermukim di lereng-lereng terjal dan lembah-lembah kecil dalam kelompok-kelompok kecil, terpencar, dan terisolir. Secara topografi dan geologi wilayah ini memiliki potensi rawan bencana, yaitu bencana tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Daerah-daerah yang mempunyai kemiringan besar yang memungkinkan terjadinya gerakan tanah dijumpai pada bagian tengah mengarah ke timur. Lokasi banjir di Kabupaten Pegunungan Bintang terdapat di lokasi bandara, yaitu di Bandara Batom dan Oksibil. Kawasan rawan bencana banjir lainnya terdapat di Distrik Batani, Teiraplu, dan Awimbon. Kawasan yang rawan terhadap bencana longsor terdapat di sekitar daerah suaka alam Jayawijaya karena kelerengan wilayah yang sangat curam. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Distrik Pamek, Nongme, Batani, Borme, Weime, Okbab, Bime, Eupumek, Okbape, Okbibab, Oksop, Okaon, Oksebang, Oklip, Pepera, Oksamol, Okhinka, Kiwirok, Alesom, Awimbon, dan Kawor.

Kondisi Kependudukan di Kabupaten Pegunungan Bintang

Karakteristik sosial penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan rendah, produktivitas rendah, kemampuan daya saing rendah, tingkat pengangguran tinggi, tingkat pendapatan rendah, dan kualitas kesehatan rendah. Suku-suku asli di Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari Suku Ngalum (mayoritas), Suku Katengban, dan Suku Murop.

Jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2013 adalah sebesar 69.304 jiwa dan meningkat menjadi 70.697 jiwa pada tahun 2014, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai 5 orang/km² pada tahun 2014 dengan rata-rata jumlah penduduk 4 jiwa/rumah tangga. Pada tahun 2014, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 114, yang berarti di antara 114 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan data tahun 2013, meliputi 7.412 jiwa adalah murid Sekolah Dasar (SD), 964 jiwa murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 321 jiwa murid Sekolah Menengah Umum (SMU). Tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2014 masih cukup rendah, karena masih didominasi oleh jumlah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD, yaitu total keduanya sekitar 85%.

Tabel 1. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2013	2014
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	26.733	29.078
2. Tidak/Belum Tamat SD	3.873	3.919
3. Sekolah Dasar/MI/ Sederajat	5.128	5.190
4. SLTP Umum/MTs sederajat/Kejuruan	2.518	2.548
5. SMU/MA/Sederajat	2.197	2.223
6. SM Kejuruan	399	404
7. Diploma I/II	202	204
8. Akademi/DIII	253	256
9. Universitas	604	611
Jumlah	43.908	44.435

Sumber : BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2015

Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Studi Kasus: Desa Denom Atukbin, Distrik Pepera

Tabel 2. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Tamat Tahun 2013-2014

No	Tingkat Pendidikan Tertinggi	2013	2014
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	29.793	29.670
2	Tidak/Belum Tamat SD	4.045	4.028
3	Sekolah Dasar/MI/ Sederajat	5.732	5.350
4	SLTP Umum/MTs/ sederajat/ Kejuruan	2.633	2.622
5	SMU/MA/ Sederajat	2.303	2.293
6	SM Kejuruan	418	416
7	Diploma I/II	209	208
8	Akademi/DIII	262	261
9	Universitas	627	624
Jumlah		45.661	45.472

Sumber : BPS Kabupaten Pegunungan Bintang, 2015

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Pegunungan Bintang tercermin pada angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tahun 2016, yang mencapai angka 41,90. Angka IPM ini masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia rendah ($IPM < 55,0$) menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kabupaten Pegunungan Bintang berada pada urutan 27 dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua (Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2017).

Perekonomian Kabupaten Pegunungan Bintang

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang berupa hutan yang merupakan hak ulayat adat dan umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian. Potensi sektor pertanian khususnya bagi ketahanan pangan di Kabupaten Pegunungan Bintang sangatlah besar dan prospektif. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub sektor itu mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Luas panen padi pada tahun 2014 seluas 59 ha dengan produksi 153,8 ton, daerah potensi padi di Distrik Iwur dan Batom. Luas panen tanaman Jagung 205 ha, merata di 21 distrik induk, ubi-ubian (ubi jalar, ubi kayu, keladi) dengan luas panen ubi kayu 209 ha, ubi jalar 6.085 ha dan keladi 211 ha dengan total produksi mencapai 64.517 ton. Luas panen kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 140 ha dan 74 ha dengan total produksi 840 ton, atau sebesar 1,25

persen dari tanaman bahan makanan. Produksi tanaman sayuran pada tahun 2014 sebanyak 25.351 ton. Akan tetapi kebutuhan sayuran masih disuplai dari Kabupaten Jayapura dikarenakan sayuran yang dihasilkan penduduk umumnya dikonsumsi sendiri.

Pengembangan tanaman pangan yang dapat dilaksanakan pada potensi lahan kering dengan luas sekitar 157.267 ha dan potensi lahan basah seluas 66.200 ha, diarahkan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan pelaku ekonomi mengingat kehidupan masyarakat sangat tergantung pada sektor pertanian. Secara sosial budaya, pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang sangat sesuai dengan kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam bidang pertanian. Apalagi sesuai dengan karakter masyarakat Pegunungan Tengah Papua, masyarakat Pegunungan Bintang adalah masyarakat yang mandiri, memiliki budaya kerja keras dan semangat gotong royong yang sangat tinggi. Tantangan utama pengembangan pertanian di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah mendorong perubahan pola pengusahaan pertanian dari yang bersifat subsisten menjadi pola tani yang berorientasi pasar (ekonomis dan nilai tambah).

Produksi tanaman sayuran terdiri dari bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, kembang kol, tomat, terung, kacang panjang, petsai/sawi, kacang merah, buncis, labu Siam, kangkung, bayam, wortel, bawang daun, dan cabe besar, mengalami peningkatan di tahun 2008, kecuali tanaman kacang merah. Dari 16 jenis tanaman tersebut, produksi terbesar ada pada tanaman kubis (268 ton). Jenis tanaman sayuran terdiri dari bayam, kubis, terong, sawi, tomat, kacang panjang, kangkung, dan labu siam, dengan luas panen 503,78 ha dan produksi yang dihasilkan sebesar 3.340,11 ton. Tanaman buah-buahan yang telah dibudidayakan seluas 54,58 ha dengan menghasilkan produksi sebesar 504,85 ton yang terdiri dari jeruk manis, nanas, pisang, nangka, jambu biji, alpukat dan pepaya.

Komoditi perkebunan yang utama di Kabupaten Pegunungan Bintang ini adalah kopi. Komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan dengan area perkebunannya seluas 236 ha dengan hasil produksi sebanyak 15 ton pada tahun 2015.

Berikutnya adalah komoditi vanili dengan luas areal perkebunannya sekitar 25 ha. Pengembangan perkebunan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan lahan potensial sekitar 507.730 ha diarahkan pada upaya untuk meningkatkan volume produksi hasil perkebunan dan pendapatan petani. Dari aspek lingkungan, pembangunan perkebunan ditujukan untuk mendukung pelestarian lingkungan terutama pada wilayah-wilayah resapan air, konservasi mata air, dan hutan lindung. Pada tahun 2006 dilaksanakan kegiatan studi perwilayahan komoditas berdasarkan zona agro ekologi serta pengadaan bibit jeruk manis, durian, nangka, mangga dan rambutan sebanyak 7.500 bibit, pengadaan bibit sayur-sayuran dan pengadaan peralatan pertanian serta dilaksanakan pelatihan bagi PPL. Secara tradisional masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang telah akrab dengan tanaman perkebunan kopi.

Jenis ternak yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang meliputi: sapi, kambing, dan babi. Populasi ternak terbesar sebagai konsumsi lokal masyarakat sebesar 88.176 ekor dengan jenis ternak terbanyak adalah babi dengan sebaran yang merata di seluruh distrik sedangkan jenis ternak unggas yang terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah ayam kampung sebanyak 59.649 ekor dan itik 12.386 ekor dengan produksi telur masing-masing sebanyak 3.988 kg dan 1.528 kg.

Jenis perikanan darat yang menonjol di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah ikan mas dan ikan nila (terutama ikan nila merah). Luas areal budidaya perikanan air tawar adalah 106,83 ha dengan jumlah kelompok pengelola sebanyak 162 kelompok dan anggota sebanyak 2.164 orang. Potensi perikanan air tawar baik berupa budidaya maupun tangkap cukup besar potensinya, karena banyaknya aliran sungai yang cukup besar.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang masih berupa hutan dengan luas areal mencapai 1.532.991 ha atau sekitar 94%. Hutan ini berupa hutan primer yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat

diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh Menteri Kehutanan.

Potensi ekonomi lainnya adalah madu lebah hutan dan kulit buaya. Potensi pengembangan lebah madu ini sangat besar karena wilayah hutan Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat luas. Potensi untuk pengembangan lebah madu terdapat hampir di semua distrik. Potensi buaya alam di terdapat di Distrik Iwur, Oksibil, Kiwirok, Batom. Jenis buaya setempat adalah *Crocodyllus purosus*, dan *Crocodyllus novaeguineae*

Kabupaten Pegunungan Bintang terkenal sebagai daerah yang cukup potensial akan kandungan bahan tambang dan mineral serta bahan galian. Bahan tambang dan mineral tersebut antara lain emas, perak, tembaga, keramik, nikel, talk, marmer, kobal, batu mulia, minyak dan gas bumi, aluminium, asbes dan platina, sedangkan potensi bahan galian antara lain batu kapur/batu gamping, pasir dan kerikil. Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dikategorikan sebagai daerah yang cukup berprospek terhadap potensi bahan galian, baik itu bahan galian logam maupun non logam. Bahan tambang yang menonjol meliputi emas, tembaga, perak, minyak bumi, dan batu bara. Potensi minyak bumi terdapat di distrik Kawor dan Awimbon (cekungan kawor), sedangkan potensi batu bara terdapat di Distrik Iwur, Kawor, Awimbon, dan sebagian wilayah Okbape.

Posisi bahan galian di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan singkapan permukaan atau dekat permukaan, namun indikasi bahan galian tersebut menerus ke bawah permukaan, untuk lempung sampai kedalaman 6 meter, pasir kedalamannya 0,9 meter. Potensi galian didominasi oleh jenis bahan galian golongan C dan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Ada indikasi terdapat potensi bahan berupa mineral industri seperti gibs, kaolin, oker, batu tokesi, pasir, besi, clai, fospat, belerang

Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Studi Kasus: Desa Denom Atukbin, Distrik Pepera

dan limestone dalam bentuk gamping serta mineral vital seperti emas dan mineral strategis seperti tembaga. Berdasarkan kondisi geologi dengan susunan batuan yang terbentuk di Kabupaten Pegunungan Bintang dimungkinkan terdapat bahan tambang yang dapat digali.

Kondisi Sarana Prasarana di Kabupaten Pegunungan Bintang

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan seperti fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan transportasi masih menjadi salah satu kendala besar dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Aksesibilitas di wilayah ini masih sangat rendah dan baru bisa dijangkau lewat transportasi udara (menggunakan pesawat kecil) yang sangat bergantung pada perubahan cuaca yang sering berkabut. Umumnya pesawat dapat beroperasi antara pukul 06.00 pagi hingga pukul 11.00 siang. Akibatnya, harga berbagai barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan, yang juga harus didatangkan terlebih dahulu dari Kota Jayapura dengan menggunakan transportasi udara, menjadi sangat mahal di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Pada tahun 2014, jumlah TK sebanyak 6 unit dan 389 murid, SD sebanyak 84 unit dan 10.224 murid, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 13 unit dan 1.418 murid serta SMA dan SMK sebanyak 5 unit dan 661 murid. Secara keseluruhan jumlah sekolah di Pegunungan Bintang sebanyak 108 unit sekolah dan jumlah murid sebanyak 12.692 murid.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun 2014 sebanyak 29 unit, puskesmas pembantu sebanyak 12 unit, dengan dokter umum sebanyak 3 orang di Distrik Oksibil dan 1 orang di Distrik Okbibab, 1 dokter di Distrik Iwur, 1 dokter di Distrik Kiwirok, dan 2 dokter di Distrik Batom, dokter gigi 1 orang. Perawat kesehatan sebanyak 81 orang, sarjana keperawatan 1 orang, bidan 8 orang, tenaga farmasi 1 orang, sarjana farmasi dan apoteker 2 orang, tenaga sanitarian 3 orang, tenaga kesehatan masyarakat 4 orang, gizi 4 orang. Lebih kurang 90% masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang masih menggunakan rumah tradisional yang sangat sederhana dan tidak memenuhi syarat rumah sehat. Rumah-

rumah tradisional tersebut berada dalam lingkungan yang belum tertata baik serta kekurangan sarana/prasarana sanitasi dan kesehatan. Akibatnya banyak masyarakat yang terserang penyakit ISPA, paru-paru basah, TBC dan disentri cukup tinggi. Bahkan, hampir tiap tahun selalu ada penderita yang meninggal.

Sumberdaya air yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sungai. Sungai-sungai di Kabupaten Pegunungan Bintang, baik yang besar maupun yang kecil, berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Berdasarkan hasil kajian dan identifikasi sumberdaya alam di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2005, aliran Sungai Mamberamo diperkirakan dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar kurang lebih 10.000 MW. Dari sekian banyak sungai, baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, itu pun untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil seperti PLTMH. Hal ini disebabkan, selain memerlukan modal besar dan teknologi tinggi, juga jumlah penduduk masih sedikit dan tersebar serta kondisi geografis yang cukup sulit. Selain sungai, sumberdaya air yang dimiliki Kabupaten Pegunungan Bintang adalah potensi air tanah.

Tabel 3. Potensi Sungai sebagai Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Pegunungan Bintang

No.	Nama Sungai	Perkiraan Daya (MW)
1	Mamberamo	9.932
2	Eilanden	2.291
3	Digul	232

Sumber: BAPPEDA Kab. Pegunungan Bintang, 2012

Untuk air tanah di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat tergantung pada ketinggian wilayah setempat. Wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan ini menjadikan potensi air tanahnya tidak terlalu tinggi, bahkan dapat dikatakan rendah.

Tabel 4. Jenis Potensi Air Tanah di Kabupaten Pegunungan Bintang

Jenis potensi air tanah	Luas (ha)
Potensi air tanah rendah	127.467,88
Potensi air tanah sangat rendah	1.298.976,99
Potensi air tanah sedang	141.855,13
Jumlah	1.568.300,00

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang, 2012

Kondisi Umum Desa Denom Atukbin

Lokasi Desa Denom Atukbin cukup strategis dalam konteks kewilayahan karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) dan memiliki kondisi fisik kawasan bukan merupakan kawasan rawa sehingga lahannya cukup potensial sebagai kawasan terbangun dan kawasan pertanian tanaman pangan. Desa Denom Atukbin berada di Distrik Pepera Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2012-2032 Distrik Pepera dijadikan sebagai PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) dalam sistem perkotaan di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan fungsi pusat pemerintahan distrik, perkebunan, pertanian dan wisata.

Secara astronomis letak Desa Denom Atukbin berada pada $5^{\circ} 7'13.18''$ - $5^{\circ} 7'21.28''$ LS dan $140^{\circ}55'49.25''$ T- $141^{\circ}0'0''$ BT. Adapun batas administrasi Desa Denom Atukbin adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ibukota Distrik Pepera

Sebelah Selatan : Distrik Tarub

Sebelah Barat : Kampung Insim Distrik Tarub

Sebelah Timur : Kampung Marangtikin Lama dan PNG

Wilayah Desa Denom Atukbin memiliki bentuk topografi yang landai dan berbukit dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar kondisi alam berupa dataran rendah berbukit, hanya sebagian kecil di Desa Denom Atukbin yang berupa dataran landai. Dari seluruh wilayah desa, berdasarkan keterangan tanahnya dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi kemiringan lereng, yaitu:

- Satuan morfologi dataran rendah/datar, dengan kemiringan 0-10% dijumpai di semua kawasan permukiman dan kawasan aktivitas masyarakat Desa Denom Atukbin.
- Satuan dataran landai dengan kemiringan dengan kemiringan 10-45%, meliputi sebagian Desa Denom Atukbin yang digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian.
- Satuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan $>45\%$, meliputi sebagian besar Desa Denom Atukbin.

Pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Studi Kasus: Desa Denom Atukbin, Distrik Pepera

Gambar 3. Peta Orientasi Desa Denom Atukbin (BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016)

Berdasarkan klasifikasi iklim Kabupaten Pegunungan Bintang tergolong ke dalam zona agroklimate A, artinya suatu wilayah yang mempunyai bulan basah berturut-turut >10 bulan dengan bulan kering berturut-turut dalam satu tahun <2 bulan. Menurut *Schmidt* dan *Ferguson* (1951) tipe curah hujan tergolong tipe curah hujan A, artinya bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang tergolong daerah beriklim basah (bulan basah sepanjang tahun tanpa bulan kering).

Beberapa sumber daya dalam lingkup hidrologi di Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi sangat krusial tersebut, yaitu DAS (Daerah Aliran Sungai) yang dapat di telusuri dari hulu (kepala kali) sampai berujung di muara (muara sungai), pesisir pantai dan laut.

1. Sungai

Terdapat beberapa sungai yang mengalir melintasi kawasan Desa Denom Atukbin diantaranya yang mengalir di sebelah barat Sungai Dunam (Denom), Sungai Walimkan, Sungai Mapyer, Sunbai Kibon, dan Sungai Kunsu dan sebelah timur mengalir Sungai Ban, Sungai Athem.

2. Air Hujan

Air hujan di Kampung Denom Atukbin tidak dimanfaatkan untuk keperluan air bersih dikarenakan ketersediaan air bersih dari sungai yang cukup melimpah. Air hujan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan pertanian secara alami. Tingginya air hujan di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mencapai 3.000-4.000 milimeter per tahun merupakan potensi yang menguntungkan buat sektor pertanian.

Gambar 4. Sungai Kunsu (atas) dan Sungai Ban/Bon (bawah), (Hasil Survei 2016)

Tanah-tanah dominan yang dijumpai di Kabupaten Pegunungan Bintang digolongkan ke dalam 5 (lima) ordo tanah, yaitu: Entisols, Inceptisols, Ultisols, Molisols dan Oxisols. Jenis tanah di Desa Denom Atukbin cocok untuk tanaman pangan seperti umbi-umbian, ketela pohon, singkong, dan jenis tanaman pangan lainnya.

Kondisi Kependudukan di Desa Denom Atukbin

Jumlah penduduk Desa Denom Atukbin tahun 2016 adalah 214 jiwa yang terdiri dari 42 KK. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Denom Atukbin lebih banyak jumlah penduduk laki-laki yaitu sebesar 120 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebesar 94 jiwa.

Gambar 5. Jenis Tanah di Desa Denom Atukbin
(Hasil Survei 2016)

Seluruh 42 kepala keluarga bermata pencaharian bertani, berburu dan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan keterbatasan data terutama tren jumlah penduduk pada 5 (lima) tahun terakhir maka jumlah kepadatan penduduk secara pasti di Desa Denom Atukbin belum bisa diprediksi namun dengan melihat jumlah penduduk dari data tahun 2016 yang berjumlah 214 jiwa dan dibandingkan dengan luas wilayah maka bisa dikatakan kepadatan penduduk di Desa Denom Atukbin masih sangat rendah.

Kondisi Sarana Prasarana di Desa Denom Atukbin

Desa Denom Atukbin berada di bagian timur dari Kabupaten Pegunungan Bintang dan merupakan wilayah yang berada di antara perbatasan dengan negara Papua New Guinea (PNG) sehingga desa ini merupakan gerbang penghubung bagi RI dan PNG yang terletak di pegunungan tengah.

Gambar 6. Kondisi Jalan dan Jembatan di Desa Denom Atukbin (Hasil Survei 2016)

Fungsi jaringan jalan di Desa Denom Atukbin adalah jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan tersebut merupakan jalan dengan perkerasan tanah yang melintasi tengah kampung, dengan lebar jalan sekitar 2 meter dan panjang 300 meter. Untuk akses keluar desa belum ada jalan yang memadai namun masyarakat menggunakan jalan setapak yang telah dibuat untuk menuju Oksibil dan ke PNG.

Pada tahun 2016 terdapat sebuah lapangan terbang di Desa Denom Atukbin dengan panjang *run away* 350 meter dan jenis pesawat yang saat ini dilayani tanpa jadwal tetap adalah dari Maskapai *Tariku* dan *MAF*. Ada penambahan 200 meter yang masih dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat sehingga nantinya diharapkan panjang *run away* mencapai 550 meter.

Pergerakan lokal dilakukan dengan berjalan kaki menuju lokasi perkebunan dan tempat berburu di sekitar kampung, sedangkan pergerakan regional, umumnya menuju Oksibil yang merupakan ibu kota kabupaten, juga dengan berjalan kaki atau menggunakan moda transportasi udara. Pergerakan regional juga bisa terjadi manakala adanya pergerakan penduduk antar negara yaitu penduduk Desa Denom Atukbin dan penduduk PNG dengan motif pergerakan berupa kunjungan karena hubungan kekerabatan.

Gambar 7. Sarana dan Prasarana Transportasi Udara di Desa Denom Atukbin (Hasil Survei 2016)

Penggunaan lahan di kawasan desa dibagi menjadi dua jenis yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun dibagi hanya dimanfaatkan sebagai pemukiman, fasilitas perkantoran. Dan untuk lahan tidak terbangun dibagi menjadi ladang, lapangan dan makam. Jenis penggunaan tanah yang paling dominan adalah lahan tidak terbangun.

Berdasarkan hasil survei lapangan tahun 2016 dapat dilihat bahwa belum ada fasilitas kesehatan maupun tenaga medis yang memberikan pelayanan di Desa Denom Atukbin. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat Desa Denom Atukbin harus pergi ke Oksibil atau ke Kota Tabubil di PNG. Berdasarkan hasil pencatatan kesehatan warga di temukan beberapa kasus penyakit seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Kasus Penyakit di Desa Denom Atukbin Tahun 2016

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Keterangan
1	TBC	1	Meninggal Dunia
2	HIV/AIDS	1	Meninggal Dunia
3	Malaria	5	
4	Pilek	10	
5	Diare	13	
6	Penyakit Kulit	1	
7	Katarak	1	
8	Sakit Gigi	1	

Sumber : Hasil Survei 2016

Pada tahun 2016 belum ada fasilitas pendidikan maupun tenaga pengajar di Desa Denom Atukbin. Masih banyak

masyarakat yang belum bisa baca tulis namun ada beberapa juga yang sudah mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Rencana Pembangunan Desa Denom Atukbin

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang merencanakan akan membangun Desa Denom Atukbin sebagai kota mandiri dengan harapan dapat mengakhiri keterisolasian dan ketertinggalan desa tersebut. Karena letaknya yang berbatasan dengan negara PNG, posisi Desa Denom Atukbin dianggap strategis untuk dikembangkan sebagai kota mandiri sehingga dapat menjadi daya tarik bagi warga negara tetangga dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan ekonominya. Pembangunan Desa Denom Atukbin direncanakan akan diimplementasikan dalam jangka waktu 20 tahun dengan urutan prioritas pembangunan sebagai berikut (BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016):

a. Prioritas Pertama

Penanganan terhadap masalah-masalah utama yang ada, misalkan permasalahan yang timbul di sekitar pusat desa. Mengingat pada kawasan tersebut merupakan kawasan yang diperkirakan akan memiliki perkembangan cukup tinggi dengan adanya rencana-rencana pengembangan baru sehingga prioritas awal adalah masalah aksesibilitas melalui pengembangan jaringan jalan baru, perbaikan dan

- pemeliharaan serta pengembangan sarana transportasi seperti bandara perintis. Penanganan terhadap permasalahan tersebut harus didukung dengan solusi yang mampu mengatasi secara tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan lagi.
- b. **Prioritas Ke-Dua**
Pengendalian terhadap kawasan-kawasan yang rawan terhadap konflik tata guna tanah maupun yang menimbulkan konflik lingkungan yang merusak lingkungan harus dibatasi sehingga perkembangan wilayahnya menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah dikemudian hari akibat dari perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - c. **Prioritas Ke-Tiga**
Pembebasan lahan atau penyediaan lahan untuk peruntukan bagi kegiatan baru. Mengingat masih banyak lahan desa yang belum terbangun maka akan memudahkan penataan dan peruntukkan fungsi kawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - d. **Prioritas Ke-Empat**
Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan seperti pengembangan infrastruktur dasar guna mendukung kegiatan perkembangan kawasan desa, khususnya pada kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya kurang sehat, misalnya permukiman kumuh, maupun pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan strategis dan mampu mendukung perkembangan.
 - e. **Prioritas Ke-Lima**
Penataan lingkungan di wilayah perencanaan seperti penataan ruang terbuka hijau baik berupa taman desa, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya. Mengingat fungsi dari ruang terbuka hijau ini sangat penting dan mutlak harus ada yaitu sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.
- Secara garis besar program-program terkait yang perlu diprioritaskan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun adalah sebagai berikut (BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang, 2016):
- A. Program Lima Tahun Pertama (Tahun 2017-2021)
 1. Kelayakan mengenai pemanfaatan ruang yang ada di pusat-pusat pelayanan perkotaan yang telah ditetapkan seperti penempatan fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, peribadatan, perdagangan, kesehatan dan pengembangan lahan, sampai pada pembebasan lahan untuk kegiatan yang mendukung perkembangan pusat pelayanan masing-masing wilayah desa.
 2. Studi kelayakan terhadap rencana pengembangan sistem jalan drainase dengan perluasan jaringan ke seluruh wilayah dan penyediaan saluran sesuai perkiraan kebutuhan.
 - B. Program Lima Tahun Ke-Dua (Tahun 2022-2027)
 1. Studi yang terkait dengan perencanaan estetika yaitu pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH yang ada di wilayah desa.
 2. Studi terkait dengan transportasi, khususnya transportasi di jalan kolektor sekunder dan lokal primer serta sarana transportasi.
 - C. Program Lima Tahun Ke-Tiga (Tahun 2028-2031)
 1. Melanjutkan pengembangan kolektor sekunder.
 2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap dan didukung dengan tenaga medis yang memadai dalam hal ini yang direkomendasikan adalah pada Puskesmas Suru-Suru.
 - D. Program Lima Tahun Ke-Empat (Tahun 2031-2036)

1. Pengembangan RTH seperti jalur hijau di jalan, taman, konservasi, daerah resapan air, dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan berbagai rencana program pembangunan tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan sumber daya yang berasal dari luar desa, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya, mengingat masih serba terbatasnya, baik kapasitas penduduk asli (kuantitas dan kualitas) maupun sarana prasarana yang tersedia di Desa Denom Atukbin dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebagai sebuah desa, Denom Atukbin masih berada pada tingkatan desa tertinggal dan memerlukan lebih banyak usaha dan waktu untuk berkembang menjadi desa berkembang hingga desa mandiri, apalagi menjadi kota mandiri.

Agar penduduk asli desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, perlu terlebih dahulu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas OAP di sana, antara lain misalkan lewat pendidikan dan pelatihan agar kualitas sumber daya manusia Desa Denom Atukbin dapat meningkat. Hanya saja yang perlu diperhatikan dalam prosesnya adalah bagaimana upaya ini dapat diterima oleh seluruh penduduk asli desa dan tidak menimbulkan dampak negatif berupa: rasa tidak puas, bersikap pasif, apatis, regresif, agresif dan destruktif terhadap pihak pemerintah, akibat perubahan sangat cepat yang harus mereka hadapi.

V. PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang perlu memperhatikan penggunaan modal pembangunan lokal berupa sumber daya manusia asli Papua dalam rencana pembangunannya. Jika tidak ada penyesuaian rencana program pembangunan yang menuju modernisasi ini, dengan kapasitas penduduk asli desa, yang diperkirakan masih belum banyak berubah juga pada masa dua puluh tahun mendatang, maka pada akhirnya

penduduk asli desa hanya akan menjadi penonton atas berbagai program pembangunan yang berlangsung di sana, bukan sebagai pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang. 2012. *RTRW Kabupaten Pegunungan Bintang 2012-2032*.
- BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang. 2016. *Masterplan Kota Mandiri Desa Denom Atukbin Distrik Pepera Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2016*.
- BPS Kabupaten Pegunungan Bintang. 2015.
- Diamond, J. 2015. *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?* Jakarta: KPG.
- Djojosoekarto, Dr. Agung, dkk. 2012. *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance), Studi Reflektif Antropologis*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
- Hall, G. and Patrinos, H. 2010. *Chapter 1: Introduction*, World Bank: Indigeneous Peoples, Poverty and Development Draft Manuscript.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2015. *Rencana Strategis Bidang Pemerintahan Desa*. Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.
- Koentjaraningrat dkk. 1994. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2017.
- Levi, Jerome M. and Lewis, Biorn Maybury. 2010. *Chapter 2: Becoming Indigenous: Identity and Heterogeneity in a Global Movement*, World Bank: Indigeneous Peoples, Poverty and Development Draft Manuscript.

Modouw, J. 2013. *Pendidikan dan Peradaban Papua: Suatu Tinjauan Kritis Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Bajawa Press.

Suryawan, I N., Ed. 2011. *Tanah Papua di Garis Batas, Perspektif, Refleksi dan Tantangan*, Malang: Setara Press.

Throsby, D. 2001. *Economic and Culture*. United Kingdom: Cambridge University Press.